**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sekarang ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Negara lain. Dalam proses reformasi sekarang ini diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuous quality improvemen*). Dalam rangka inilah dirasakan perlunya mengkaji masalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar berkontribusi dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan menjadi wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana pembangunan watak bangsa (*Nation Character Building*).

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan ini lebih diperlukan lagi dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Proses reformasi yang sedang bergulir, ditandai dengan beberapa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, moneter, hankam, dan kebijakan sekolah lainnya.

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. “Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia”[[1]](#footnote-1).

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan mayarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugateksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Sekolahkurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan di muka, “perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu *(quality oriented)* merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak”[[2]](#footnote-2).

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang otomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sector pendidikan sebagai salah satu yang diotomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sebagai pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1989. Salah satu Isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secarademokratis dan berkeadilan”[[3]](#footnote-3).

Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah, yang implementasinya ditingkat sekolah, baik rencana pengembangan sarana, dan alat ketanagaan, kurikulum serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancangnya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Madrasah juga merupakan bentuk pendidikan yang sesuai dengan tuntunan reformasi, yakni pendidikan yang murah dan berkualitas. Disamping itu proses pendidikan di madrasah lebih komprehensif jika dibandingkan dengan pendidikan umum, terutama dalam aspek pengembangan intelektual, emosional, kreatifitas, dan spiritual peserta didik yang dilakukan secara integral, serta didukung oleh lingkungan madrasah yang kondusif.

Pendidikan ikut serta memberikan nuansa dalam gerakan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu agenda pendidikan adalah “memberikan otonomi yang luas terhadap madrasah, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat”[[4]](#footnote-4).

Berdasarkan observasi awal penulis di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, penulis mendapati bahwa kepala sekolah tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal meningkatkan mutu pendidikannya, seolah-olah lembaga pendidikan jalan sendiri dan masyarakat juga punya urusan sendiri.

Dengan latar belakang tesebut jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan penidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, oleh karenanya penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti permasalahan tersebut.

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan judul: ”Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan diMadrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, adapun fokus penelitian ini yaitu Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan diMadrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara

Adapun penajaman fokus penelitian ini adalah peningkatan mutu pendidikan dari sisi prestasi atau hasil belajar siswa pada bidang studi akidah ahlak diMadrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

1. **Rumusan masalah**

Dari fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan diMadrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
2. Bagaimana gambaran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan diMadrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
3. **Definisi operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang kurang jelasmengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu dikemukakan definisi operasional variable penelitian. Adapun yang menjadi definisi operasional menurut penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen berbasis sekolah dalam penulisan ini adalah penerapan system manajemen sekolah dalam hal ini di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, dimana sekolah diberikan kebebasan dan kewenangan disertai tanggung jawab yang luas untuk mandiri, maju dan berkembang berdasarkan kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang ditempatkan oleh pemerintah pusat.
2. Peningkatan mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap peningkatan prestasi atau hasil belajar siswa semester genap pada bidang studi akidah ahlak dan dilihat berdasarkan nilai rapor tahun 2010 s/d 2013.
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
2. Untuk mengetahui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan diMadrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
3. **Manfaat penelitian**

Hasil penelitian terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah (mbs) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara ini diharapkan memeberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Bagi peneliti dapat menambah khasanah keilmuan mengenai manajemen berbasis sekolah (MBS) khususnya ditingkat madrasah dan dapat diterapkan dalam pembinaan organisasi pendidikan di masyarakat.
2. Secarateoritis / akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai korelasi antara implementasi MBS dengan mutu pendidikan serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dan dengan sampel penelitian yang lebih banyak.
3. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS).
4. Sebagai bahan masukan kepada penentu kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar di pusat dan di daerah khususnya dalam memperhatikan factor-faktor penentu pelaksana manajemen berbasis sekolah (MBS).
1. Umaedi, (*Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M*), CEQM, 2004) h. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo 2002), h. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Oemar Hamalaki*, Evaluasi Kurikulum* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 45 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 15 [↑](#footnote-ref-4)